

IV. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Malang Tahun 2018

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)	
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur																	
	1) Penyempurnaan hasil Analisis Jabatan	Dokumen hasil analisis jabatan yang sudah disempurnakan	a. Penyempurnaan Hasil analisis jabatan sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan														Bagian Organisasi BKD Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	75.000.000,00
		1 Dokumen	b. Penerapan hasil penyempurnaan pada jabatan															
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring															
			d. Evaluasi															
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi															
	2) Penyempurnaan Hasil Analisis Beban Kerja	Dokumen hasil analisis beban kerja yang sudah disempurnakan	a. Penyempurnaan hasil ABK sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan														Bagian Organisasi BKD Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	95.000.000,00
		1 Dokumen	b. Penerapan hasil pada jabatan dan kebutuhan pegawai															
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring															
			d. Evaluasi															
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi															
	3) Penyempurnaan standar kompetensi jabatan	Dokumen standar kompetensi jabatan yang sudah disempurnakan	a. Penyempurnaan standar kompetensi jabatan														Bagian Organisasi BKD Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	75.000.000,00
			b. Penerapan hasil pada jabatan															
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring															
		1 Dokumen	d. Evaluasi															
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi															

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)			
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
4)	Penyempurnaan <i>job grading</i>	Dokumen <i>job grading</i> yang disempurnakan	a. Penyusunan rencana penyempurnaan <i>job grading</i>														Bagian Organisasi BKD Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	75.000.000,00		
		1 Dokumen	b. Penyempurnaan <i>job grading</i> untuk seluruh jabatan sesuai dengan hasil evaluasi jabatan																	
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring penyempurnaan <i>job grading</i>																	
			d. Penerapan hasil <i>job grading</i> pada penentuan sistem penggajian																	
			e. Monitoring dan tindak lanjut penerapan																	
			f. Evaluasi																	
			g. Tindak lanjut hasil evaluasi																	
5)	Review (penyempurnaan) rencana kebutuhan PNS sesuai beban kerja dan kompetensi yang dibutuhkan SKPD (sesuai dengan perkembangan terakhir)	Dokumen rencana kebutuhan PNS yang sudah disempurnakan	a. Review (penyempurnaan) rencana kebutuhan PNS sesuai beban kerja dan kompetensi yang dibutuhkan SKPD (sesuai dengan perkembangan terakhir)														BKD Bagian Organisasi Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018		
		1 dokumen	b. Penerapan hasil pada rekrutmen																	
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring																	
			d. Evaluasi																	
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi																	
6)	Penyempurnaan sistem rekrutmen PNS (persiapan untuk rekrutmen 2018)	Sistem rekrutmen yang sudah diperbaiki	a. Penyempurnaan sistem rekrutmen pegawai (persiapan untuk rekrutmen 2018)														BKD Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur			
		1 sistem	b. Uji coba sistem baru																	
7)	Pelaksanaan rekrutmen dengan sistem baru (tahun 2018)	Persentase CPNS yang direkrut sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	a. Pelaksanaan rekrutmen dengan sistem baru														BKD Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur			
		100%	b. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring																	
			c. Evaluasi																	
			d. Tindak lanjut hasil evaluasi																	

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
8)	Penyempurnaan Penerapan sistem rekrutmen terbuka untuk jabatan-jabatan tertentu	Persentase pejabat yang direkrut sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	a. Penyempurnaan Penerapan sistem rekrutmen terbuka untuk jabatan-jabatan tertentu													BKD Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018
		80%	b. Penentuan jabatan-jabatan yang akan dibuka														
			c. Penerapan sistem dalam lingkup internal Pemda														
			d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring														
			e. Evaluasi														
			f. Tindak lanjut hasil evaluasi														
9)	Evaluasi Jabatan	Dokumen hasil evaluasi jabatan	a. Lanjutan Penerapan hasil evaluasi jabatan pada Sistem Manajemen SDM Aparatur												Bagian Organisasi BKD Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur		
		1 Dokumen	b. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring														
			c. Evaluasi														
			d. Tindak lanjut hasil evaluasi														
10)	Review penggunaan hasil <i>assessment</i> kompetensi untuk pengelolaan SDM	Persentase pejabat yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	a. Review penggunaan hasil <i>assessment</i> kompetensi untuk pengelolaan SDM												BKD Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur		
			b. Penggunaan hasil <i>assessment</i> untuk pengelolaan SDM														
		80%	c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring														
			d. Evaluasi														
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi														
11)	Updating kebutuhan dan rencana pengembangan PNS untuk tahun 2018-2019	Dokumen rencana pengembangan PNS	a. Penyusunan rencana penyusunan kebutuhan pengembangan PNS	Sudah dilaksanakan tahun 2017													
		1 dokumen	b. Penyusunan rencana kebutuhan pengembangan PNS														

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)		
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
12)	Lanjutan Pelaksanaan pengembangan PNS sesuai kebutuhan	Persentase pegawai yang mengikuti pengembangan pegawai	a. Pelaksanaan pengembangan PNS														BKD Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018	
		6,79%	b. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring pelaksanaan pengembangan PNS																
			c. Evaluasi																
			d. Tindak lanjut hasil evaluasi																
	13)	Penyusunan rencana penempatan dan pola karier PNS	Aplikasi rencana penempatan dan pola karier PNS	a. Penyusunan rencana penempatan dan pola karier PNS, termasuk pola karier jabatan fungsional	Sudah disusun tahun 2015												BKD Bagian Organisasi Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur		
			1 Aplikasi	b. Penerapan rencana penempatan dan pola karier PNS, termasuk pola karier jabatan fungsional															
				c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring															
				d. Evaluasi															
				e. Tindak lanjut hasil evaluasi															
	14)	Lanjutan Penerapan rencana penempatan dan pola karier	Persentase pejabat yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	a. Penerapan rencana penempatan dan sistem pola karier pada Sistem Manajemen SDM															BKD Bagian Organisasi Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
			80%	b. Pembaruan data rencana penempatan dan pola karier															
				c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring															
			d. Evaluasi																
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi																
15)	Penyusunan sistem manajemen kinerja PNS	Sistem manajemen kinerja	a. Penyusunan rencana pembangunan sistem manajemen kinerja PNS dan pengembangannya	Sudah disusun tahun 2015												BKD Bagian Organisasi Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur			
		1 sistem	b. Penyusunan Sistem Manajemen kinerja PNS dan pengembangannya																
			c. Uji coba																
			d. Penyempurnaan hasil uji coba																

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
16)	Updating sistem manajemen kinerja PNS	Sistem manajemen kinerja	a. Penyusunan rencana <i>updating</i> sistem manajemen kinerja PNS	■												BKD Bagian Organisasi Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018
		1 sistem	b. <i>Updating</i> sistem manajemen kinerja PNS		■	■	■										
			c. Uji coba				■										
			d. Penyempurnaan hasil uji coba				■	■									
17)	Lanjutan Penerapan sistem manajemen kinerja Aparatur	Persentase SKPD yang menerapkan Sistem	a. Penerapan sistem manajemen kinerja Aparatur					■	■	■	■	■	■	■	■	BKD Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	
		100%	b. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring					■	■	■	■	■	■	■			
			c. Evaluasi						■	■	■	■	■	■			
			d. Tindak lanjut hasil evaluasi							■	■	■	■	■			
18)	Sosialisasi berbagai kebijakan kepegawaian	Jumlah sosialisasi	a. Penyusunan rencana sosialisasi		■										BKD Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur		
		3 kali	b. Pelaksanaan Sosialisasi			■			■			■					
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring				■						■				
			d. Evaluasi							■				■			
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi								■	■	■	■			
19)	Penerapan kebijakan kepegawaian	Jumlah kebijakan kepegawaian yang diterapkan	a. Penyusunan rencana penerapan aturan kebijakan kepegawaian yang menjadi kewajiban PNS				■								BKD Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur		
		1 Peraturan	b. Penerapan (setelah melalui sosialisasi)					■	■	■	■	■	■	■			
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring					■	■	■	■	■	■	■			
			d. Evaluasi							■	■	■	■	■			
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi								■	■	■	■			
20)	Lanjutan Pelaksanaan pengembangan kepribadian <i>role model</i>	Persentase Pejabat yang memperoleh pengembangan kepribadian	a. Lanjutan Pelaksanaan pengembangan <i>role model</i> bagi para pejabat	■											BKD Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur		
		100%	b. Pelaksanaan pengembangan <i>role model</i> bagi para pejabat		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
			c. Penerapan <i>role model</i> bagi seluruh pejabat		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
			d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
			e. Evaluasi							■	■	■	■	■			
			f. Tindak lanjut hasil evaluasi								■	■	■	■			

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)			
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
	21) Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring seluruh kegiatan program SDM	Persentase kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	a. Monitoring terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan program SDM														Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018		
		80%	b. Tindak lanjut hasil monitoring																	
	22) Evaluasi seluruh kegiatan dalam program SDM	Persentase kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	Evaluasi terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan program SDM																	
		80%																		
	23) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan dalam program SDM	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	a. Tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi																	
	80%	b. Perbaikan kegiatan-kegiatan program SDM																		
	24) Pelaksanaan berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan sebagai tindak lanjut sebagaimana telah diidentifikasi pada tahun 2017	Persentase kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	Pelaksanaan berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan sebagai tindak lanjut sebagaimana telah diidentifikasi pada tahun 2017														BKD Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur			
		80%																		
	25) Kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pemerintah Kota Malang	Persentase hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru	a. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi																	
			b. Penyusunan prioritas																	
	100%	c. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan																		
		d. Perbaikan/penyusunan kembali/pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya																		
2.	Peningkatan disiplin aparatur																			
	1) Lanjutan Penerapan sistem penilaian kinerja PNS	Persentase PNS yang memperoleh nilai kinerja dibawah standar	a. Lanjutan Penerapan sistem penilaian kinerja PNS														BKD Bagian Organisasi Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018		
			b. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring																	
			c. Evaluasi																	
			d. Tindak lanjut hasil evaluasi																	

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)			
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
	2) Penyempurnaan Integrasi sistem manajemen kinerja dengan Sistem Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (Sistem Manajemen Kinerja Pegawai)	Persentase aparatur yang capaian kerjanya sesuai target	a. Penyempurnaan Integrasi sistem manajemen kinerja dengan Sistem Penilaian Prestasi Kerja aparatur (Sistem Manajemen Kinerja aparatur)														BKD Dinas Kominfo Bagian Organisasi Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018		
		80%	b. Penerapan Sistem Manajemen Kinerja yang telah diintegrasikan dengan Sistem Penilaian Prestasi Kerja aparatur																	
			c. Monitoring penerapan dan tindak lanjut hasil monitoring																	
			d. Evaluasi hasil penerapan																	
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi																	
	3) Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Persentase pelanggaran disiplin PNS yang telah ditindaklanjuti	a. Penyusunan rencana pelaksanaan pembinaan disiplin PNS																BKD Inspektorat Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	
		100%	b. Pembentukan Tim pembinaan disiplin PNS																	
			c. Pelaksanaan pembinaan disiplin PNS																	
			d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring pelaksanaan kegiatan																	
			e. Evaluasi																	
		f. Tindak lanjut hasil evaluasi																		
3.	Penataan Peraturan Perundang-undangan																			
1)	Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dalam pembahasan	a. Penyusunan rencana kerja asistensi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah														Bagian Hukum Pokja Penataan Peraturan Perundang-undangan	375.000.000,00		
			b. Pelaksanaan asistensi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																	
		30 Ranperda	c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring pelaksanaan kegiatan																	
			d. Evaluasi																	
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi																	

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung	Anggaran
-----	------------------	-----------	---------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	----------

		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	jawab/SKPD terkait	(Rp.)	
2)	Workshop Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD	Tingkat partisipasi masyarakat dalam workshop Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD	a. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan workshop													Bagian Hukum Pokja Penataan Peraturan Perundang-undangan	400.000.000,00	
			b. Pelaksanaan kegiatan workshop Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD															
		85%	c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring pelaksanaan kegiatan															
		d. Evaluasi																
		e. Tindak lanjut hasil evaluasi																
	3)	Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah usulan SKPD yang telah dilakukan sinkronisasi dan diharmonisasikan	a. Penyusunan rencana harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah usulan SKPD													Bagian Hukum Pokja Penataan Peraturan Perundang-undangan	850.000.000,00
				b. Pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah usulan SKPD														
			30 Ranperda	c. Penyusunan rekomendasi hasil harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah usulan SKPD														
			d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring pelaksanaan kegiatan															
			e. Evaluasi															
			f. Tindak lanjut hasil evaluasi															
4)	Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Peraturan Walikota dan Rancangan Keputusan Walikota	Jumlah Ranperwali dan Rankepwali yang telah dilakukan sinkronisasi dan diharmonisasikan	a. Penyusunan rencana harmonisasi dan sinkronisasi Ranperwali dan Rankepwali usulan SKPD													Bagian Hukum Pokja Penataan Peraturan Perundang-undangan	110.000.000,00	
			b. Pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi Ranperwali dan Rankepwali usulan SKPD															
		60 Ranperwali 500 Rankepwali	c. Penyusunan rekomendasi hasil harmonisasi dan sinkronisasi Ranperwali dan Rankepwali usulan SKPD															
		d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring pelaksanaan kegiatan																
		e. Evaluasi																
		f. Tindak lanjut hasil evaluasi																

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung	Anggaran
-----	------------------	-----------	---------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	----------

		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	jawab/SKPD terkait	(Rp.)	
5)	Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang telah dilakukan sinkronisasi dan diharmonisasikan 20 Perda 20 Perwali	a. Identifikasi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang perlu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi													Bagian Hukum Pokja Penataan Peraturan Perundang-undangan	380.000.000,00	
			b. Penyusunan rencana harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota															
			c. Pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota															
			d. Penyusunan rekomendasi hasil harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota															
			e. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring pelaksanaan kegiatan															
			f. Evaluasi															
			g. Tindak lanjut hasil evaluasi															
6)	Redokumentasi Produk Hukum Daerah	Jumlah dokumen Produk Hukum Daerah yang disusun 5 Dokumen	a. Identifikasi produk hukum daerah yang perlu didokumentasikan kembali													Bagian Hukum Pokja Penataan Peraturan Perundang-undangan	160.000.000,00	
			b. Penyusunan rencana pendokumentasian kembali produk hukum daerah															
			c. Pelaksanaan pendokumentasian kembali produk hukum daerah															
			d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring pelaksanaan kegiatan															
			e. Evaluasi															
			f. Tindak lanjut hasil evaluasi															
7)	Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring seluruh kegiatan program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	a. Monitoring terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan program Penataan Peraturan Perundang-undangan													Bagian Hukum Pokja Penataan Peraturan Perundang-undangan	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018	
		80%	b. Tindak lanjut hasil monitoring															
8)	Evaluasi seluruh kegiatan dalam program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	Evaluasi terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan program Penataan Peraturan Perundang-undangan															
		80																

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)	
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
9)	Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan dalam program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	a. Tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi														Bagian Hukum Pokja Penataan Peraturan Perundang-undangan	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018
		80%	b. Perbaikan kegiatan-kegiatan program Penataan Peraturan Perundang-undangan															
	10)	Pelaksanaan berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan sebagai tindak lanjut sebagaimana telah diidentifikasi pada tahun 2017	Persentase kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	Pelaksanaan berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan sebagai tindak lanjut sebagaimana telah diidentifikasi pada tahun 2017														
11)	Kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Penataan Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Kota Malang	Persentase hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru	a. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi														Bagian Hukum SKPD terkait Pokja Penataan Peraturan Perundang-undangan	
		80%	b. Pelaksanaan koordinasi kerja sama permasalahan peraturan perundang-undangan															
		100%	c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring pelaksanaan kegiatan															
			d. Evaluasi															
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi															
4.	Penguatan Pengawasan																	
1)	Penyusunan kebutuhan tenaga fungsional Auditor dan P2UPD	Jumlah Auditor	Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 5 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur														BKD Inspektorat Pokja Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018
		14 orang																
	Jumlah P2UPD	11 orang																
2)	Penyusunan rencana pengembangan Auditor dan P2UPD	Persentase Auditor dan P2UPD yang memperoleh peningkatan kompetensi	Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 12 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur															
		100%																

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)			
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
3)	Penyusunan rencana peningkatan penerapan SPIP	Persentase evaluasi SPIP SKPD %	a. Penyusunan rencana evaluasi penerapan SPIP b. Sosialisasi instrumen evaluasi SPIP	Sudah disusun/dilaksanakan tahun 2015												Inspektorat Pokja Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018			
4)	Lanjutan Penerapan SPIP pada SKPD yang belum melaksanakan/belum optimal melaksanakan	Persentase SKPD yang menerapkan SPIP 90%	a. Lanjutan penerapan SPIP di SKPD b. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring c. Evaluasi d. Tindak lanjut hasil evaluasi																	
5)	Penyusunan rencana monitoring pengelolaan keuangan untuk seluruh SKPD untuk tahun 2018	Opini BPK WTP	Penyusunan rencana monitoring																	
6)	Sosialisasi tertib administrasi pengelolaan keuangan	Jumlah Sosialisasi 4 kali	Sosialisasi tertib administrasi pengelolaan keuangan	Sudah dilaksanakan tahun 2015 - 2017														BPKAD Inspektorat Pokja Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja		
7)	Pelaksanaan monitoring pengelolaan keuangan di SKPD tahun 2018	Opini BPK WTP	a. Pelaksanaan monitoring pengelolaan keuangan di seluruh SKPD b. Tindak lanjut hasil monitoring																	
8)	Sosialisasi LHKPN	Jumlah Sosialisasi 2 kali	Sosialisasi LHPKN	Sudah dilaksanakan tahun 2015												BKD Inspektorat Pokja Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja				
9)	Asistensi penyusunan LHKPN bagi pejabat	Persentase pejabat yang telah menyerahkan LHKPN 100%	a. Asistensi penyusunan LHKPN bagi pejabat b. Monitoring penyerahan LHKPN	Sudah dilaksanakan tahun 2015 - 2016																
10)	Penyusunan rencana pengembangan sarana pengaduan penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti 100%	Penyusunan rencana pengembangan sarana pengaduan penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN	Sudah dilaksanakan tahun 2015												Inspektorat Pokja Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja				
11)	Lanjutan Penerapan sarana pengaduan penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti 100%	Penerapan sarana pengaduan penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN																	
12)	Tindak lanjut pengaduan informasi indikasi terjadinya KKN	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti 100%	Tindak lanjut pengaduan informasi indikasi terjadinya KKN																	

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)	
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
13)	Lanjutan Penerapan <i>wistleblower</i>	Persentase jumlah pengaduan yang berhasil ditindaklanjuti	a. Lanjutan Penerapan <i>wistleblower</i>														Inspektorat Pokja Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018
		100%	b. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring															
			c. Evaluasi															
			d. Tindak lanjut hasil evaluasi															
14)	Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring seluruh kegiatan pada Program Penguatan Pengawasan	Persentase kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	a. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring															
		80%	b. Tindak lanjut hasil monitoring															
15)	Evaluasi seluruh kegiatan dalam program Penguatan Pengawasan	Persentase kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	Evaluasi seluruh kegiatan dalam program Penguatan Pengawasan															
		80%																
16)	Tindak lanjut hasil evaluasi seluruh kegiatan dalam program Penguatan Pengawasan	Persentase kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	a. Tindak lanjut terhadap hasil evaluasi															
		80%	b. Perbaikan kegiatan-kegiatan program penguatan pengawasan															
17)	Pelaksanaan berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan sebagai tindak lanjut sebagaimana telah diidentifikasi pada tahun 2017	Persentase kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	Pelaksanaan berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan sebagai tindak lanjut sebagaimana telah diidentifikasi pada tahun 2017															
		80%																
18)	Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Penguatan Pengawasan	Persentase hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru	a. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi															
		100%	b. Penyusunan prioritas															
			c. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan															
			d. Perbaikan/penyusunan kembali/pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya															

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)	
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
5.	Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan																	
	1) Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Persentase tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang telah mendapatkan pelatihan 70%	Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 12 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur												BKD Inspektorat Pokja Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018		
	2) Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja		Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 12 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur															
6.	Pengembangan Sistem dan Prosedur Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik																	
	1) Lanjutan Penyusunan sistem dan prosedur tetap	Jumlah kebijakan terkait sistem dan prosedur tetap	a. Lanjutan Penyusunan sistem dan prosedur tetap														Bagian Organisasi Bagian Hukum SKPD terkait Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018
			b. Penetapan sistem dan prosedur tetap															
			c. Penerapan sistem dan prosedur tetap															
			d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring															
			e. Evaluasi															
			f. Tindak lanjut hasil evaluasi															
2) Penyusunan/perbaikan SP (termasuk SP pengawasan dan penyusunan laporan)	Jumlah Standar Pelayanan yang telah disusun sesuai ketentuan 40 SP	a. Penyusunan SP baru/ penyempurnaan SP yang ada di SKPD														SKPD terkait Bagian Organisasi Inspektorat Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		
		b. Pembahasan SP bersama seluruh <i>stakeholder</i>																
		c. Penerapan SP di SKPD																

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)	
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			d. Monitoring penerapan dan tindak lanjut hasil monitoring															
			e. Evaluasi hasil penerapan															
			f. Tindak lanjut hasil evaluasi															
3)	Penyusunan/perbaikan SOP (termasuk SOP pengawasan dan penyusunan laporan)	Jumlah SOP yang telah diterapkan	a. Penyusunan SOP baru/ penyempurnaan SOP yang ada di SKPD														SKPD terkait Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018
		175 SOP	b. Penerapan SOP di SKPD															
			c. Monitoring penerapan dan tindak lanjut hasil monitoring															
			d. Evaluasi hasil penerapan															
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi															
4)	Penyusunan Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dokumen Akademis dan Rancangan Perda	a. Perencanaan penyusunan sistem penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu	Sudah disusun tahun 2015												BP2T Bagian Hukum Bagian Organisasi Bagian Kerja Sama dan Penanaman Modal Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		
		2 Dokumen	b. Pengkajian penerapan sistem PTSP															
			c. Penyusunan Naskah Akademis dan Ranperda sistem penyelenggaraan PTSP															
			d. Pembahasan dengan melibatkan seluruh seluruh stakeholder															
			e. Tindak lanjut hasil pembahasan															
			f. Penyampaian ke Bagian Hukum untuk proses legislasi															
			g. Legislasi Rancangan Perda															
5)	Penyusunan Tata Cara Pencabutan Izin dan Non Izin	Rancangan Peraturan Walikota	a. Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota	Sudah disusun tahun 2015														
		1 Ranperwal	b. Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota															
			c. <i>Workshop</i> pembahasan Rancangan Peraturan Walikota	Sudah disusun/dilaksanakan tahun 2015														
			d. Tindak lanjut hasil <i>workshop</i>															
			e. Penyampaian ke Bagian Hukum untuk proses penetapan															

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)		
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
			f. Penerapan pelayanan Pencabutan Izin dan Non Izin g. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring h. Evaluasi i. Tindak lanjut hasil evaluasi	Sudah disusun/dilaksanakan tahun 2016															
7.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik																		
	1) Peninjauan lapangan dan penyusunan pertimbangan teknis permohonan izin	Rekomendasi Tim untuk Penerbitan Izin 11.932 Rekom	a. Penyusunan rencana peninjauan lapangan terhadap permohonan izin b. Pembentukan Tim Teknis Perizinan c. Pelaksanaan peninjauan lapangan dan penyusunan pertimbangan teknis permohonan izin d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring e. Evaluasi f. Tindak lanjut hasil evaluasi	■														BP2T Tim Teknis Perizinan Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018
	2) Peninjauan lapangan dan pengawasan izin	Rekomendasi Tim Pengawasan Perizinan 11.932 Rekom	a. Penyusunan rencana peninjauan lapangan terhadap izin yang diterbitkan b. Pembentukan Tim Pengawasan Perizinan c. Pelaksanaan peninjauan lapangan dan penyusunan pertimbangan teknis hasil pengawasan d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring. e. Evaluasi f. Tindak lanjut hasil evaluasi	■														BP2T Tim Pengawasan Terpadu Perizinan Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)		
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
3)	Pelayanan Mobil Keliling	Layanan izin trayek keliling	a. Penyusunan rencana layanan mobil keliling	■												BP2T Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018		
		4 kali/bulan	b. Penyiapan sarana, prasarana dan petugas layanan	■	■														
			c. Pelaksanaan layanan			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	
			d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring				■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	
			e. Evaluasi						■										
			f. Tindak lanjut hasil evaluasi							■	■	■	■	■	■			■	
	4) Lanjutan Penerapan SIM Perizinan		Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	95%	a. Lanjutan Penerapan SIM Perizinan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	
		b. Monitoring pelaksanaan SIM Perizinan			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	
		c. Tindak lanjut terhadap hasil monitoring			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■
		d. Evaluasi terhadap penerapan								■									■
		e. Tindak lanjut hasil evaluasi									■	■	■	■	■			■	■
	5) Survei kepuasan masyarakat terhadap berbagai jenis pelayanan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemda	80%	a. Penyusunan rencana survei kepuasan masyarakat terhadap seluruh jenis pelayanan					■									Bagian Organisasi SKPD terkait Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	
				b. Penyusunan instrumen survei dan uji cobanya					■	■									
				c. Pelaksanaan survei							■	■	■						
				d. Pengolahan data dan analisis hasil survei								■	■	■					
e. Penyusunan rekomendasi													■						
6) Pengkajian penerapan PTSP	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemda	80%	a. Pengkajian penerapan PTSP	Sudah dilaksanakan tahun 2016															
			b. Penyusunan kerangka sistem PTSP																
	c. Penyusunan rencana penerapan																		
	a. Penerapan PTSP sesuai rencana																		
	d. Monitoring dan tindak lanjut penerapan																		
	e. Evaluasi																		
	f. Tindak lanjut hasil evaluasi																		

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
7)	Lanjutan pelaksanaan PTSP untuk <i>quick wins</i>	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemda	a. Lanjutan Penerapan PTSP sebagai <i>quick wins</i>														Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018
		80%	b. Monitoring dan tindak lanjut penerapan														
			c. Evaluasi														
			d. Tindak lanjut hasil evaluasi														
8)	Pengembangan PTSP (<i>quick wins</i>) untuk seluruh jenis pelayanan administratif	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemda	a. Penyusunan rencana pengembangan PTSP untuk seluruh jenis pelayanan administratif	Sudah dilaksanakan tahun 2017												BP2T SKPD terkait Bagian Organisasi Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	
		80%	b. Penyiapan PTSP (sistem, mekanisme kerja, penggunaan teknologi informasi, SDM, sarana dan prasana, dst.)	Sudah dilaksanakan tahun 2017													
			c. Pelaksanaan PTSP														
			d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring														
			e. Evaluasi														
			f. Tindak lanjut hasil evaluasi														
9)	Identifikasi kebutuhan perbaikan manajemen pelayanan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemda	Identifikasi kebutuhan perbaikan manajemen pelayanan pada masing-masing jenis pelayanan	Sudah dilaksanakan tahun 2017													
		80%															
10)	Lanjutan Penerapan teknologi informasi	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemda	b. Lanjutan penerapan teknologi informasi pada jenis pelayanan yang masuk PTSP dan menjadi <i>quick wins</i>													BP2T Dinas Kominfo Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	
		80%	c. Monitoring dan tindak lanjut penerapan														
			d. Evaluasi														
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi														

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)	
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
11)	Monitoring dan evaluasi pelayanan publik	Persentase Unit Pelayanan yang telah melakukan pelayanan sesuai standar	a. Penyusunan rencana pelaksanaan monev ke Unit Pelayanan dalam rangka pelayanan publik		■											Bagian Organisasi Inspektorat Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018	
			b. Pembentukan Tim Monev pelayanan publik			■												
			c. Penetapan parameter monev pelayanan publik				■											
			d. Pelaksanaan monev pelayanan publik					■	■	■	■	■	■	■	■			■
			e. Monitoring dan tindak lanjut penerapan						■	■	■	■	■	■	■			■
			f. Evaluasi							■	■	■	■	■	■			■
			g. Tindak lanjut hasil evaluasi								■	■	■	■	■			■
12)	Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring seluruh kegiatan pada Program Peningkatan kualitas Pelayanan Publik	Persentase kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	a. Monitoring terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan program Peningkatan kualitas Pelayanan Publik	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			
			b. Tindak lanjut hasil monitoring	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	
13)	Evaluasi seluruh kegiatan dalam program Peningkatan kualitas Pelayanan Publik	Persentase kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	Evaluasi terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan program Peningkatan kualitas Pelayanan Publik							■								
				80%														
14)	Tindak lanjut hasil evaluasi seluruh kegiatan dalam program Peningkatan kualitas Pelayanan Publik	Persentase kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	a. Tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
			b. Perbaikan kegiatan-kegiatan program Peningkatan kualitas Pelayanan Publik	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	
15)	Kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Peningkatan kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Kota Malang	Persentase hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru	a. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi											■	SKPD terkait Bagian Organisasi Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			
			b. Penyusunan prioritas											■				
			c. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan											■				
			d. Perbaikan/penyusunan kembali/pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya											■				
		100%																

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
8.	Pelaksanaan Pengkajian dan Penerapan Standar Manajemen Mutu																
	1) Sertifikasi Standar Manajemen Mutu ISO 9001-2008	Persentase Unit Pelayanan yang telah memiliki Sertifikat ISO 9001:2008	a. Penyusunan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008													SKPD penyelenggara Pelayanan Publik Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018
			b. Implementasi ISO 9001 : 2008														
			c. Audit Internal														
		45%	d. Perbaikan hasil audit internal														
			e. Rapat Tinjauan Manajemen														
			f. Audit Eksternal/Sertifikasi														
			g. Tindakan perbaikan hasil Audit Sertifikasi														
	2) Pemeliharaan Standar Manajemen Mutu ISO 9001:2008	Persentase Unit Pelayanan yang telah memiliki Sertifikat ISO 9001:2008	a. Review dokumentasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008														
			b. Implementasi ISO 9001 : 2008														
		45%	c. Audit Internal														
			d. Perbaikan hasil audit internal														
			e. Rapat Tinjauan Manajemen														
			f. Audit Eksternal/Sertifikasi														
			g. Tindakan perbaikan hasil Audit Sertifikasi														
9.	Penataan Administrasi Kependudukan																
	1) Pelayanan administrasi kependudukan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kependudukan	a. Pelayanan administrasi kependudukan												Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018	
		95%	b. Monitoring dan tindak lanjut pelaksanaan														
			c. Evaluasi														
			d. Tindak lanjut hasil evaluasi														
				2019													

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)		
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2)	Penerapan SIM <i>data base</i> kependudukan	SIM <i>data base</i> kependudukan	a. Penerapan SIM <i>data base</i> kependudukan														Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018	
		1 sistem	b. Monitoring pelaksanaan SIM <i>data base</i> kependudukan																
			c. Tindak lanjut terhadap hasil monitoring																
			d. Evaluasi terhadap penerapan																
			e. Tindak lanjut terhadap hasil																
3)	Pengelolaan <i>Maintenance</i> Jaringan dan alat-alat Pelayanan Administrasi kependudukan	Jaringan dan alat-alat Pelayanan Administrasi kependudukan	a. Penyusunan pengelolaan <i>maintenance</i> jaringan dan alat-alat pelayanan administrasi kependudukan	Sudah dilaksanakan tahun 2015															
			b. Identifikasi <i>Trouble Shooting</i> jaringan																
		1 Jaringan Pelayanan Administrasi kependudukan	c. <i>Maintenance</i> jaringan dan alat-alat pelayanan administrasi kependudukan	Sudah dilaksanakan tahun 2015															
			d. Monitoring dan tindak lanjut pelaksanaan																
			e. Evaluasi																
			f. Tindak lanjut hasil evaluasi																
4)	Pengembangan Sistem Informasi Antrian dan Pantauan Pelayanan	Sistem Informasi Antrian dan Pantauan Pelayanan	a. Penyusunan rencana pengembangan Sistem Informasi Antrian dan Pantauan Pelayanan	Sudah dilaksanakan tahun 2016															
		1 sistem	b. Persiapan sarana dan prasarana Sistem Informasi Antrian dan Pantauan Pelayanan																
			c. Uji coba																
			d. Penyempunaan hasil uji coba																
			e. Penerapan Sistem Informasi Antrian dan Pantauan Pelayanan																
			f. Monitoring dan tindak lanjut penerapan																
			g. Evaluasi																
			h. Tindak lanjut hasil evaluasi																

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)		
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
5)	Monitoring, evaluasi dan pelaporan administrasi kependudukan	Dokumen hasil monev dan pelaporan administrasi kependudukan	a. Penyusunan rencana monitoring, evaluasi dan pelaporan administrasi kependudukan														Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018	
		2 Dokumen	b. Monitoring terhadap pelaksanaan seluruh pelayanan administrasi kependudukan																
			c. Evaluasi terhadap pelaksanaan seluruh pelayanan administrasi kependudukan																
			d. Tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi																
			e. Penyusunan pelaporan administrasi kependudukan																
10.	Quick Wins																		
1)	Pengembangan sistem informasi pelayanan kependudukan di Kelurahan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kependudukan di Kelurahan	a. Identifikasi Kelurahan untuk penerapan sistem informasi pelayanan kependudukan berbasis <i>online</i> (diselaraskan dengan kegiatan nomor 1 Program Penataan Administrasi Kependudukan)	Sudah dilaksanakan tahun 2015												Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018		
		95%	b. Penyusun sistem	Sudah dilaksanakan tahun 2015															
			c. Uji coba sistem	Sudah dilaksanakan tahun 2015															
			d. Penyempurnaan sistem	Sudah dilaksanakan tahun 2015															
			e. Penerapan sistem	Sudah dilaksanakan tahun 2016															
		% aktivitas penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai target	f. Monitoring pelaksanaan sistem	Sudah dilaksanakan tahun 2016															
		90%	g. Tindak lanjut terhadap hasil monitoring	Sudah dilaksanakan tahun 2016															
			h. Evaluasi terhadap penerapan sistem	Sudah dilaksanakan tahun 2016															
			i. Tindak lanjut terhadap hasil evaluasi																
			j. Perbaikan terhadap sistem untuk pelaksanaan tahun berikutnya																

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2)	Penerapan pelayanan perizinan paralel			Sudah dilaksanakan tahun 2015												BP2T Bagian Organisasi Bagian Hukum Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018
	a) Pengkajian pelayanan perizinan paralel			Sudah dilaksanakan tahun 2015													
	b) Penentuan jenis pelayanan yang dapat diintegrasikan dalam pelayanan perizinan paralel			Sudah dilaksanakan tahun 2015													
	c) Penyusunan rancangan pelayanan perizinan paralel			Sudah dilaksanakan tahun 2015													
	d) Uji coba			Sudah dilaksanakan tahun 2015													
	e) Penyempurnaan hasil uji coba			Sudah dilaksanakan tahun 2015													
	f) Sosialisasi			Sudah dilaksanakan tahun 2015													
	g) Lanjutan Penerapan pelayanan perizinan paralel	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan paralel 90%	Penerapan pelayanan perizinan paralel	Sudah dilaksanakan tahun 2016													
	h) Monitoring	% aktivitas penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai target 90%	(1) Monitoring	Sudah dilaksanakan tahun 2016													
	i) Evaluasi		(2) Tindak lanjut hasil monitoring	Sudah dilaksanakan tahun 2016													
j) Pemeliharaan dan pengembangan pelayanan perizinan paralel	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan paralel	(1) Pemeliharaan pelayanan perizinan paralel yang sudah berjalan baik															
		(2) Pengembangan pelayanan perizinan paralel untuk jenis-jenis pelayanan baru															
	90%	(3) Penerapan pelayanan perizinan paralel															

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)		
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
11.	Zona Integritas Menuju WBK/WBBM																		
	1) Penandatanganan Pakta Integritas	Jumlah SKPD yang telah menandatangani Pakta Integritas	Penandatanganan Pakta Integritas	Sudah dilaksanakan tahun 2015												Inspektorat SKPD terkait Pokja Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018		
	2) Penyiapan SKPD sebagai unit yang ditetapkan untuk Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	Jumlah SKPD yang disiapkan untuk ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Penyiapan 1 SKPD sebagai unit yang ditetapkan untuk Zona Integritas Menuju WBK/WBBM																
	3) Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	Jumlah SKPD yang .ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM																
	4) Pelaksana Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di 10 SKPD yang baru ditetapkan untuk menerapkan Zona Integritas menuju WBK/WBBM tahun 2018	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemda	a. Pelaksana Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di 9 SKPD																
		80%	b. Pelaksana Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di 1 SKPD tahun 2018																
	5) Monitoring dan Evaluasi	Persentase aktivitas penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai target	a. Monitoring																
		80%	b. Evaluasi																
	6) Pelaksanaan perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dalam rangka Zona Integritas Menuju WBK/WBBM untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan	Persentase aktivitas penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai target	a. Tindak lanjut terhadap hasil evaluasi																
		80%	b. Perbaikan terhadap sistem untuk pelaksanaan tahun berikutnya																
	7) Penyiapan SKPD lain sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada tahun berikutnya	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemda	a. Penyusunan rencana penetapan Zona Integritas menuju WBK/WBBM untuk SKPD lainnya																
		80%	b. Penetapan SKPD untuk menerapkan Zona Integritas menuju WBK/WBBM																

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)			
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
12.	Penataan Ketatalaksanaan																			
	1) Penataan ketatalaksanaan yang terkait dengan pelayanan dalam rangka mendukung pelaksanaan <i>quick wins</i>	Persentase dari Jumlah kebijakan ketatalaksanaan baru yang diterbitkan sebagai pengganti kebijakan ketatalaksanaan yang dipandang kurang mendukung pelaksanaan pelayanan	a. Identifikasi berbagai peraturan perundangan daerah yang dipandang kurang mendukung pelaksanaan dan pelaksanaan <i>quick wins</i>	Sudah dilaksanakan tahun 2015												Bagian Organisasi Bagian Hukum SKPD terkait Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018			
		80%	b. Penyusunan rencana pembahasan penataan	Sudah dilaksanakan tahun 2015																
			c. Lanjutan perumusan kebijakan perubahan untuk peraturan yang dipandang kurang mendukung pelaksanaan dan pelaksanaan <i>quick wins</i>																	
			d. Penetapan kebijakan																	
			e. Implementasi																	
	2) Penyempurnaan <i>e-procurement</i>	Tingkat kepuasan pelayanan pengadaan barang dan jasa	a. Penyempurnaan <i>e-procurement</i>	Sudah dilaksanakan tahun 2016												LPSE ULP Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik				
		95%	b. Lanjutan penerapan <i>e-procurement</i>																	
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring																	
			d. Evaluasi																	
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi																	
13.	Penguatan dan Penataan Organisasi																			
	1) Penataan organisasi yang terkait dengan pelayanan dalam rangka mendukung pelaksanaan <i>quick wins</i>	Persentase organisasi Perangkat Daerah yang ditata	a. Lanjutan Pelaksanaan perubahan kebijakan yang dianggap menghambat pelayanan dan menghambat penerapan <i>quick wins</i>																	
		70%	b. Monitoring																	
			c. Tindak lanjut hasil monitoring																	
			d. Evaluasi																	
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi																	

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)	
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2)	Penataan terhadap tugas dan fungsi yang tumpang tindih	Persentase kasus tumpang tindih tugas dan fungsi yang diselesaikan	a. Penyusunan rencana penataan terhadap tugas dan fungsi dengan dasar hasil pemetaan proses bisnis	Sudah dilaksanakan tahun 2015												Bagian Organisasi SKPD terkait Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018	
		100%	b. Perumusan penataan terhadap tugas dan fungsi yang tumpang tindih (termasuk menata kelembagaan)	Sudah dilaksanakan tahun 2015														
			c. Penerapan hasil penataan															
			d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring															
			e. Evaluasi															
			f. Tindak lanjut hasil evaluasi															